

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Efektivitas Kebijakan**

Andi & Gruntur (2019), menjelaskan bahwa kebijakan merupakan arah atau tindakan yang telah ditetapkan oleh beberapa actor penting yaitu pemerintah untuk mengatasi sebuah permasalahan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan, dalam menetapkan kebijakakan di perlukan tiga hal yaitu identifikasi tujuan hendak dicapai, strategi yang akan dilakukan, dan dibutuhkan respon sebagai pertimbangan terhadap kenyataan dari pelaksanaan yang merupakan bagian dari ketercapain tujuan kebijakan.

Menurut Wahab dalam Widodo (2021), berpendapat bahwa kebijakan publik di buat dalam rangka memecahkan permasalahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan kenyataan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya sekedar untuk dilakukan karena keinginan (Widodo, 2021). Kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sedangkan dalam proses pelaksanaan kebijakan keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan yang cukup berpengaruh baik dalam kekuatan sosial, ekonomi dan politik karena kebijakan yang ditetapkan mengutamakan kepentingan masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

Dalam pengambilan tindakan pemerintah di perlukan implementasi dari kebijakan. Sedangkan menurut Anggara dalam Purnamaningsih, (2022)

menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diwujudkan apabila tujuan, program-program, dan anggaran dana telah ditetapkan dengan matang untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Purnamaningsih, 2022). Tindakan selanjutnya dalam implementasi kebijakan adalah meningkatkan pemahaman terhadap arah kebijakan program-program yang telah dirumuskan yang kemudian di berlakukan (Yuliah, 2020).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran disebut dengan efektivitas (Julianto & Carnarez, 2021). Dalam hal ini, Efektif adalah sejauh mana keberhasilan dari tindakan organisasi yang didukung oleh tenaga, biaya, waktu, dan pikiran (Yodi, 2020). Efektifitas juga diartikan sebagai tingkatan keberhasilan yang telah memberikan gambaran dari ketercapaian sasaran dengan membandingkan pada target yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Suciana et al., 2022).

Dari penjelasan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan berupa aturan yang memiliki nilai-nilai tertentu yang dibuat oleh pemerintah terkait pada kebutuhan masyarakat, yang mana aturan tersebut diuraikan secara seksama dan dijalankan secara bersama-sama baik itu pemerintah atau masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bentuk dari kebijakan yang telah ditetapkan yaitu dengan mengimplementasi kebijakan, sehingga dapat mengukur sejauh mana kebijakan membawa perubahan di lingkungan dan kehidupan bermasyarakat. Pengukuran dari tingkatan keberhasilan dari implementasi kebijakan di atas disebut keefektifitasan kebijakan.

Dalam hal ini, adapun yang menjadi sifat-sifat efektivitas menurut Matthis dan Jackson dikutip oleh (S. Ningsih, 2020) Jika diukur dalam efektifitas organisasi secara umum maka, efektifitas mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu.
2. Menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan.
3. Menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan.
4. Menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan

Menurut Makmur yang dikutip oleh (Badrika & Sulandari, 2022) menjelaskan bahwa kriteria dari indikator efektifitas sebagai berikut:

1. Penetapan waktu

Penetapan waktu yang tepat dan sesuai akan berpengaruh terhadap tindakan dan keberhasilan dari tujuan. Oleh karena itu, waktu dapat dijadikan sebagai alat ukuran untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut (Habaora et al., 2021) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai jumlah aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, serta perspektif dari sudut koordinasi dengan hasil output dan maksimalisasi waktu yang tersedia untuk tugas lainnya. Adapun yang dijadikan indikator ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dibagi dua yaitu: 1) penyelesaian pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan

keutamaannya, 2) menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ketepatan waktu dapat memberikan hasil dan manfaat yang tepat diantaranya: 1) membantu memprioritaskan pekerjaan, 2) tidak adanya kecenderungan penundaan pekerjaan, 3) terhindari tabrakan waktu, pemberian kebebasan dan kontrol, 4) tidak adanya keraguan, 5) mendukung pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja. Disampaikan juga oleh (Fabiolla & Bangun, 2019) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu untuk pelaksanaan kegiatan ada lima yaitu ketersediaan tenaga kerja, peralatan yang digunakan, lokasi pelaksanaan kegiatan, manajemen, dan biaya.

## 2. Penetapan biaya

Biaya atau dana merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melancarkan tindakan sebagai pendukung dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Penggunaan anggaran atau dana yang tepat akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dari kebijakan. (Handoyo, 2019) menjelaskan bahwa Semua biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak seseorang dianggap sebagai biaya. Biaya pengeluaran kegiatan terdiri dari gaji, komisi, tunjangan, biaya sewa, pajak, biaya transportasi. Sedangkan biaya pokok terdiri dari biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya administrasi. Kemudian anggaran merupakan rencana penggunaan anggaran yang dijadikan sebagai pengukuran dan pemeriksaan kestabilan dari biaya pelaksanaan kegiatan yang disusun dengan terencana. Adapun indikator dalam melakukan penyusunan anggaran yaitu 1) penyusunan

anggaran harus realistis, 2) penyusunan anggaran harus fleksibel, dan penyusunan anggaran yang kontinu. Sedangkan hal utama perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah adanya organisasi, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penilaian dan analisa, adanya dukungan dari pelaksana kegiatan. Dari segi penyusunan anggaran disusun berdasarkan pada anggaran periodik dan anggaran kontinu (Riinawati, 2019)

### 3. Penetapan pengukuran

Penetapan pengukuran sebagai pedoman dasar yang dijadikan acuan pengukuran bagi yang terlibat dalam pelaksana kegiatan yaitu organisasi pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksana. Menurut (Makbul, 2021) menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penilain terhadap individu-individu berupa angka yang berdasarkan pada aturan prinsip-prinsip penetapan pengukuran. Prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan dengan cara menyeluruh, terbuka, adanya ketelitian, dan adanya pengawasan terhadap penilaian angka-angka yang berbentuk skor. Sedangkan menurut Robbins dikutip oleh (Dewi, 2019) pengukuran kinerja merupakan pengukuran yang berbentuk penilaian terhadap pencapaian kinerja oerorganisasi. Adapun Indikator pengukuran pencapain kinerja organisasi yaitu 1) kualitas kerja, 2) efektivitas, 3) kuantitas, 4) ketepatan waktu, 5) kemandirian, 6) komitemen organisasi.

### 4. Cara berfikir

Di jelaskan oleh (Sawir & Sos, 2021) berpikir adalah penggunaan gagasan dan ide dengan mengedepankan akal yang sehat untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah, cara berpikir merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi yang diidentifikasi oleh setiap individu yang dalam ingatannya. Kemudian dikembangkan sehingga dapat mengambil kesimpulan tertentu. Cara dasar dari berpikir dapat dilakukan dengan tiga tahapan yakni: penguraian pengertian, pengembangan ide, gagasan, dan pengambilan keputusan. Menurut (Firgula et al., 2019) ada beberapa indikator cara berpikir yaitu: 1) menginterpretasi, 2) menganalisis, 3) mengevaluasi, 4) menarik kesimpulan.

Dalam teori Kettner (2015:161) menyampaikan dalam mengukur efektivitas program terdapat lima indikator dasar yaitu:

1. Upaya (*effort*)

Upaya dalam pelaksanaan program dan ketercapaian tujuan, pemerintah dalam menghadapi permasalahan sampah melakukan upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi, pendidikan dasar dan mengarahkan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat sebagai agen merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam meminimalisir jumlah sampah. Menurut (Grand et al., 2021) upaya merupakan usaha yang digunakan untuk mencapai hasil dan manfaat yang memuaskan untuk itu dilaksanakan dengan upaya-upaya tertentu dengan sarana prasana yang menjadi pendukung. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam organisasi merupakan bagian dari upaya, seperti yang

dijelaskan oleh (Majid, 2022) bahwa cara untuk meningkatkan efektif organisasi yaitu; adanya perubahan pada struktur organisasi secara berkala sesuai kemampuan dan menetapkan struktur organisasi yang jelas, visi dan misi yang tepat, pembagian dan sistem kerja yang terurut, kualitas SDM yang sesuai kompetensi, peraturan yang tepat.

## 2. Efisiensi Biaya (*cost efficiency*)

Efisiensi merupakan salah satu pengukuran yang digunakan dalam menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada. Efisiensi terbagi atas dua bagian yaitu efisiensi teknis, kapasitas organisasi untuk mencapai hasil yang paling tinggi dari berbagai sumber data. Sedangkan efisiensi alokatif, menunjukkan kapasitas organisasi untuk melibatkan input dengan tingkat ideal yang dapat dibayangkan tingkat biaya informasi tertentu (Sintha, 2020). Untuk meningkatkan kinerja dari program penyesuaian anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan perencanaan dengan menguraikan penyusunan anggaran sehingga dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Efisiensi biaya berkaitan pelaksanaan biaya operasional, adapun indikator untuk mencapai keberhasilan biaya operasional menurut (Irman et al., 2020) yaitu 1) perencanaan anggaran, 2) penyusunan anggaran, 3) pengendalian anggaran, 3) melakukan analisis varian.

## 3. Hasil (*result*)

Hasil merupakan tingkat pencapaian dari tujuan organisasi dari pelaksanaan kegiatan. Menurut (Siregar & Pasaribu, 2022) keberhasilan dari tujuan

organisasi dipengaruhi oleh produktifitas kinerja karyawan perindividu diantaranya tingkat pendidikan, disiplin kerja, motivasi kerja, teknologi, sarana prasarana, dan manajemen. Sedangkan Sutrisno dikutip oleh (J. M. Sembiring, 2022) untuk mengukur dimensi dari kinerja terdiri dari beberapa indikator yaitu 1) kuantitas kerja, 2) kualitas kerja, 3) tanggungjawab, 4) inisiatif, 5) kerjasama. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk mengurangi peningkatan jumlah sampah dengan mengikut sertakan masyarakat untuk meminimalkan jumlah sampah sebagai penghasil sampah. sehingga sasaran dari pengelolaan sampah yaitu masyarakat mencapai hasil yang di tergetkan, kemudian dibandingkan dengan input dan output dengan menggunakan indikator yang di tentukan.

#### 4. Efektivitas biaya (*cost effectiveness*)

Dijelaskan oleh (Nugraha, 2020) Efektifitas merupakan tingkat ketercapaian keberhasilan dari tujuan organisasi. Jika tujuan sesuai sasaran yang ditetapkan maka organisasi dikata efektif. Sedangkan (Lisnawati, 2019) mengemukakan analisis efektif biaya adalah pebandingan antara hasil program dengan biaya program dengan pengkuran efektifitas yang secara umum . Keberhasilan dari terget dikerenakan sesuai dengan penyusunan anggaran pembiayaan yang dikeluarkan dalam menjalankan program. Untuk penelitian berarti biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

#### 5. Dampak (*impact*)

Menurut (Kurniawan, 2019) Dampak dapat diartikan sebagai penyebab yang memberikan pengaruh dan sebab akibat, dampak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, sedangkan seseorang yang membuat keputusan telah memperkirakan dampak dari keputusan. Pengaruh dari dampak dapat mempengaruhi sikap, tindakan dan tingkah laku dari individu. (Jurusan et al., 2022) menjelaskan bahwa dampak dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Dampak positif, pengaruh positif yang memberikan perubahan-perubahan yang saling menguntungkan dan dianggap baik tanpa ada kerugian baik manusia maupun lingkungannya. Dampak baik yang dirasakan oleh masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat terutama pada lingkungannya. 2) Dampak Negatif, menyebabkan terjadinya sesuatu yang berdampak buruk serta mengganggu pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Dampak negatif juga bisa disebut sebagai hal yang menimbulkan kerugian dari berbagai pihak tertentu.

Kemudian dijelaskan oleh Budiani di kutip oleh (Urrahmi et al., 2020) dalam mendukung terlaksananya efektivitas terdapat empat indikator pengukuran efektivitas program untuk pelaksanaannya yaitu:

1. Penetapan sasaran

Sejauh mana sasaran dituju untuk mencapai target. Sasaran sebelumnya harus ditetapkan sebelum adanya pelaksanaan dari kegiatan.

2. Sosialisasi

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, diperlu sosialisasi seperti pelatihan, pemberian materi, dan penjelasan-penjelasan dari tujuan yang yang hendak dicapai.

### 3. Ketercapaian tujuan

Dalam pelaksanaannya ketercapaian tujuan terwujud apabila adanya kesesuaian antara hasil output dan input sesuai dari yang ditargetkan.

### 4. Pemantauan kegiatan

Dilakukan ketika proses pelaksanaan kegiatan sedang berlangsung. Ditanggung jawabkan oleh para penanggung jawab dari kegiatan merupakan salah satu pemeberian perhatian kepada masyarakat yang ikut kegiatan.

Selanjutnya menurut (M.Strees, 2020) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan efektifitas dalam mewujutkannya terdapat empat aspek yaitu:

#### 1. Ciri Organisasi

Untuk melihat identitas dari organisasi dapat dilihat dengan menggunakan dua cara yaitu 1) struktur organisasi, yang jelasa akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi dari kinerja organisasi. Struktur organisasi dapat dilihat dari formalisasi kinerja, spesialisasi kinerja, dan pemberian wewenang sehingga mencapai sasaran pokok. 2) Teknologi, penyesuaian penggunaan teknologi dapat berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya yang ada dalam organisasi.

#### 2. Ciri Lingkungan

Hubungan lingkungan dan organisasi saling bergantung, penyesuaian terhadap keadaan lingkungan merupakan solusi mewujudkan efektifitas organisasi, tiga faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menyesuaikan lingkungan yaitu: 1) tingkat keterdugaan lingkungan, 2) ketepatan persepsi dari keadaan lingkungan, dan 3) tingkat rasionalitas organisasi. Faktor tersebut sangat mempengaruhi perubahan-perubahan pada lingkungan.

### 3. Ciri pekerja

Pelaku utama dari organisasi yaitu pekerja itu sendiri, adapun faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi dari pekerja: 1) perilaku, merupakan sikap yang ditunjukkan melalui tindakan pekerja saat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota yang bekerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. 2) Kesadaran merupakan inisiatif terhadap pekerjaan, dari pekerja dan manajemen. Sedangkan manajemen harus mengerti bahwa sikap dan perbedaan pendapat dapat memberikan solusi pada permasalahan, rencana selanjutnya, dan peningkatan kesempatan dalam memperbesar kerjasama yang baik. 3) Sasaran Pokok, pekerja dan manajemen mempunyai sasaran masing-masing dalam organisasi. Untuk meningkatkan efektifitas dari organisasi ditunjukkan apabila pekerja memperbesar sasaran pribadinya sehingga kebutuhan akan bekerjasama dalam organisasi semakin besar.

### 4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kebijakan yang diperlukan dilingkungan organisasi yaitu penetapan strategi, pemanfaatan sumber daya, dan pengendalian. Sedangkan yang perlu di perhatikan oleh manajemen adalah prosedur dan pemilahan kerja, pendidikan dan pengembangan karir, tugas dan tanggung jawab, dan pemberian penghargaan dari prestasi.

### **2.1.2 Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah sebuah kegiatan pengendalian sampah untuk mengurangi jumlah sampah melalui pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pebuangan sampah ke TPA, dan pemanfaatan sampah (Arifin et al., 2020). Pengelolaan sampah merupakan pengelolaan sampah yang dilakukan secara terencana dengan tujuan mencari solusi dari permasalahan sampah (Muhammad, 2023). Kegiatan penabungan dan pemilahan sampah di lingkungan masyarakat merupakan pengelolaan sampah yang di sebut dengan Bank Sampah yang menggunakan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), kegiatan ini di jalankan langsung oleh masyarakat yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengurangi jumlah sampah yang di buang ke TPA (Aini et al., 2021). Pembangunan bank sampah merupakan bentuk tindakan yang berkelanjutan pada pengelolaan sampah berwawasan lingkungan pada pengembangan sikap, kepedulian, dan kesadaran masyarakat terhadap keuntungan dan manfaat dari pengelolaan sampah yang bermutu dan bernilai ekonomi (T. B. Sembiring & SH, 2022). Sedangkan dalam pengelolaan bank sampah sebaiknya dilakukan orang-orang yang kreatif, inovatif dan mempunyai jiwa wirausaha(Sari et al., 2022).

Seperti dijelaskan oleh (Bogar et al., 2019) menjelaskan bahwa diwajibkan bahwa setiap orang untuk melakukan pengelolaan sampah yaitu dimulai dari memilah-milah jenis sampah dengan menggunakan konsep berwawasan lingkungan. Proses pengelolaan sampah merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah sebelum dibawa ke TPA. Kemudian dilakukan dengan proses daur ulang dengan penggunaan kembali sebagian komponen sampah yang dapat dimanfaatkan atau melalui proses pengomposan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dapat diartikan tidak menghasilkan sampah (Yulia, 2020). Adapun prinsip yang digunakan dalam penanganan sampah yaitu:

1. *Reduce* (Mengurangi Sampah), Sampah yang telah di buang tidak boleh menumpuk dalam jangka waktu yang lama. *Reduce* berarti mengurangi kebutuhan yang memproduksi sampah, menghemat energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi limbah yang perlu didaur ulang, dan menghindari polusi baru dengan memungkinkan penggunaan produk secara optimal. Mempunyai prinsip meminimalisir sampah juga mendorong individu untuk lebih memahami kebutuhan mereka. Prinsip pengurangan sampah agar masyarakat mengkonsumsi kebutuhannya seperlunya saja. Misalnya dengan tidak membeli barang-barang yang tidak berguna yang nantinya akan menjadi sampah dengan begitu memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih hemat.

Adapun cara yang dilakukan untuk mengurangi sampah dalam kegiatan sehari-hari yaitu:

- 1) Memilih produk dengan kemasan yang dapat di daur ulang.

- 2) hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
- 3) menggunakan produk yang dapat diisi ulang.
- 4) mengurangi penggunaan barang sekali pakai.
- 5) menggunakan email untuk mengirim surat agar bisa mengurangi sampah jenis kertas.

2. *Rause* (Menggunakan Kembali), yaitu sampah yang telah dibuang di pergunakan kembali. Prinsip *Rause* yaitu mempertimbangkan dahulu barang sebelum dibuang dan memperkirakan kemungkinannya untuk digunakan kembali. Misalnya memperbaiki barang yang rusak dibanding membeli baru juga merupakan prinsip dari *rause*.

Adapun cara menggunakan kembali sampah dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

- 1) memilih wadah atau kantong yang dapat digunakan beberapa kali seperti menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu.
- 2) menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.
- 3) menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis.
- 4) menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya.
- 5) menggunakan botol plastik bekas sebagai tempat menyimpan cairan pembersih lantai atau sebagai penyiram tanaman.

3. *Recycle* (Mendaur Ulang), sampah yang telah di pilah di daur ulang kembali sesuai dengan jenis sampah yang di buang, sehingga sampah tersebut dapat bermanfaat lagi. Daur ulang adalah cara untuk mengatasi jumlah sampah yang terus bertambah. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan energi baru agar penggunaan sumber daya lebih efisien. Mendaur ulang barang bekas sebagai bahan mentah untuk memproduksi produk baru menghemat sumber daya alam dan energi. Daur ulang membantu melestarikan sumber daya alam, mengurangi jumlah limbah, sampah dan polusi, menghemat energi, menghemat uang, dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di industri daur ulang.

Adapun proses daur ulang sampah berdasarkan jenisnya terbagi empat yaitu:

- 1) Mendaur ulang plastik. Misalnya membuat karya seni dari plastik bekas.
- 2) Mendaur ulang sampah pakaian. Misalnya membuat baju dengan model baru dari baju bekas.
- 3) Mendaur ulang sampah kertas. Misalnya membuat kerajinan dengan mendaur ulang sampah kertas maupun karton.
- 4) Pembuatan kompos. Kompos berasal dari sampah organik dan berguna sebagai pupuk tumbuhan.

Sedangkan metode pengelolaan sampah berdasarkan zatnya dapat dibedakan menjadi 1) *Solid waste generated* (penentuan Timbulan sampah), 2) *On site hadling* (penanganan yang tepat dari sumbernya). Adapun yang menjadi tahapan pengelolaan sampah berdasarkan dari zatnya yaitu terbagi menjadi empat bagian yaitu (Sarlia & Harudu, 2019);

1. Pengumpulan (*collecting*)
2. Pengangkutan (*Transfer and transport*)
3. Pengelolaan (*treatment*) yaitu pengelolaan sampah dengan merubah bentuk sampah, pembakaran, pembuatan kompos dan *energy recovery* (Sampah Sebagai Penghasil Energy)
4. Pembuangan akhir yaitu pembuangan sampah yang telah diolah di buang jika telah memenuhi persyaratan kebersihan dan lingkungan hidup.

### **2.1.3 Pendekatan Berbasis Masyarakat**

Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang, kelompok, organisasi sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir, sikap dan tingkah laku serta tindakan dari pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah (Saragih, 2022). Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mampu mandiri dan punya inisiatif dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan memberikan semangat kepada masyarakat untuk membangun dan mengembangkan diri agar mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Putra & Ismaniar, 2020). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari proses pengembangan masyarakat melalui transformasi dan sosialisasi. Tujuannya, mampu mengelola dan memecahkan masalahnya, sehingga dapat meningkatkan pola pikir dan mengurangi ketidakpahaman masyarakat dalam pengambilan keputusan (Nadia, 2022). Adapun prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
2. Upaya perbaikan dan pengembangan dilakukan berdasarkan tindakan bersama dari masyarakat dan penyusunan program yang tidak hanya mengarah pada satu tujuan.
3. Perubahan dapat ditandai dari sikap, tindakan masyarakat dalam menerima masukan dari pihak terkait.
4. Partisipasi masyarakat merupakan tahap dari peningkatan kesadaran tindakan masyarakat terhadap tujuan pengembangan masyarakat.
5. Memberikan kepercayaan kepada kaum muda terhadap program-program pengembangan masyarakat untuk mengembangkan program yang berjangka panjang.
6. Untuk mewujudkan program pengembangan masyarakat yang efektif, dibutuhkan dukungan pemerintah seperti dalam penetapan kebijakan dan peraturan yang mengikat dalam mewujutkannya.
7. Mengutamakan menggunakan sumber daya lokal untuk meningkatkan manfaat dari program pengembangan masyarakat.

Untuk memfokuskan target dan sasaran dalam menempatkan posisi masyarakat ada beberapa model pengembangan berbasis masyarakat yang menjadi tujuan utama agar terwujudnya efektifitas dari pengembangan berbasis masyarakat yaitu:

1. Masyarakat sebagai fokus dan sumber utama pengembangan.

Masyarakat sebagai sumber dari pengembangan yang menjadi objek utama tempat berlangsungnya pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi.

Adapun hasil akhir yang diberikan berdampak baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi dalam pengembangan berbasis masyarakat.

## 2. Musyawarah sebagai metode kerja

Musyawarah merupakan proses belajar bersama. Dilakukan melalui diskusi dengan melibatkan semua orang yang terkait untuk memecahkan masalah. Prinsip utama dalam musyawarah yaitu setiap orang harus duduk pada saat konsultasi pengetahuan maupun pengalaman yang setara keterampilan yang dapat dikembangkan bersama. Misalnya pemecahan masalah baru dengan berkonsultasi untuk meningkatkan kesadaran transformatif, kesetaraan dan solidaritas.

## 3. Pembebasan

Pembebasan berarti berani mengungkapkan apa yang menjadi pendapat dan menyumbangkan ide. Misalnya memengaruhi orang untuk pengembangan masyarakat melalui pengembangan komunitas, membuat program, dan menjalankan program tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengajak bicara atau musyawarah dengan masyarakat setempat sesuai kebutuhan.

## 4. Penyadaran

Penyadaran masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat menyadari keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat lingkungan berhubungan dengan lingkungan fisik Atau teknis, sosial budaya, ekonomi, politik. Adapun kegiatan penyadaran masyarakat yaitu:

- 1) Menganalisis keadaan dilakukan bersama-sama oleh masyarakat mengenai faktor penyebab masalah, masalah kelemahan internal maupun eksternal.
- 2) Melakukan analisis akar masalah, analisis solusi masalah alternatif, dan analisis opsi alternatif merupakan solusi terbaik.
- 3) Menunjukkan pentingnya perubahan upaya untuk memperbaiki keadaan antara lain: mengembangkan prioritas perubahan dan sumber daya kebutuhan dan peran pendukung (dalam bentuk modal, teknologi, manajemen, institusi).

Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan sampah disesuaikan pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan untuk memajukan sistem pengelolaan sampah, dan sistem pengelolaan sampah dikendalikan dan dievaluasi bersama masyarakat, sehingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat saat ini lebih efektif dilaksanakan (Afaluna, 2018). Pemerintah berperan dalam mendorong masyarakat, menawarkan bantuan fasilitator, dan membantu masyarakat dalam mencapai tujuannya untuk pengelolaan sampah yang baik. Masyarakat mampu mempertanggungjawabkan sampah yang mereka hasilkan sebagai produsen atau penghasil sampah. Partisipasi masyarakat dan semua masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kelompok atau komunitas dipertimbangkan, serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan organisasi, teknologi yang digunakan, sumber daya, dan faktor lainnya.

#### **2.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat**

Menurut Edward III di kutip oleh (Fadhlorrohman et al., 2021) ada empat faktor pendukung dan penghambat dari keberhasilan yaitu:

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan, dengan berkolaborasi diantara beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang baik akan memberikan dampak baik bagi kejelasan tujuan melalui saling tukar ide. Berikut tiga indikator untuk mengukur seberapa efektifitas komunikasi yaitu: 1) transmisi: proses menyampaikan pesan antara dua pihak atau lebih. Melakukan komunikasi yang efektif akan berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kebijakan. 2) kejelasan, kejelasan menyampaikan informasi dapat meningkatkan pemahaman pendengar dan mengurangi ambiguitas yang di sampaikan informan. Ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan tujuan salah arah. 3) konsistensi dapat diartikan sebagai ketepatan dari menyampaikan informasi yang mengarahkan penyampaian arahan yang tepat dan tidak berulang kali. Arahan yang berulang kali dan tidak pasti akan membingungkan pihak pelaksana dilapangan.

##### **2. Sumber Daya**

Sumber daya menjadi pendukung kedua dari implementasi kebijakan, yang terdiri dari beberapa indikator pendukung dari sumber daya yaitu: 1) Staf merupakan individu yang bergabung dalam pelaksanaan kebijakan disebut pegawai. Pegawai yang dimaksud memiliki kompeten di bidang

masing-masing. Jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaksanaan kebijakan. 2) informasi, pemahaman terhadap informasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian didukung oleh data yang telah oleh sebagai petunjuk dari informasi yang telah disampaikan. 3) wewenang, pemberian hak dan kewajiban kepada pihak yang telah ditentukan yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksana kebijakan. Efektivitas dari wewenang terlaksana jika para pelaksana dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pihak pemangku kepentingan dari efektivitas kebijakan. 4) fasilitas, kecukupan fasilitas berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi, dalam hal ini disposisi dapat diartikan sebagai sikap dan komitmen dari pejabat yang dapat mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan kebijakan. Adapun yang perlu diperhatikan dari disposisi sebagai penghargaan bagi pegawai dan untuk meningkatkan kualitas kinerja yaitu 1) penempatan dan pengangkatan birokrat, penempatan pegawai disesuaikan dengan kemampuan pegawai yang dimiliki pegawai karena hal ini berdampak pada tingkat pemahaman dan komitmen dari pegawai untuk melaksanakan kebijakan. 2) insentif, insentif sering kali disalah gunakan untuk kepentingan pribadi oleh para pembuat kebijakan. Akan tetapi pada dasarnya insentif diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada bawahannya yaitu pegawai yang mempunyai loyalitas terhadap pekerjaan.

4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang jelas dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan program dan efektifitas dari sumber daya yang ada. Kejelasan dari struktur birokrat di tentukan oleh, 1) *standar prosedur operasional (SOP)* yaitu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai keberhasilan kebijakan khusus dalam pelaksanaan kegiatan baik itu secara internal maupun eksternal. 2) pembagian tanggung jawab yaitu emberian tanggung jawab kepada birokrat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP sehingga lebih terfokus pada pertanggungjawaban dan hasil yang dicapai.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Apriliani & Maesaroh, 2021)	Efektifitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah (Sistem Laporan Sampah)	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimal karena kurangnya sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan program Silampah mengakibatkan Kurang maksimalnya kesadaran masyarakat dalam mendapatkan informasi publik</li> </ul>

2.	(Mildayati et al., 2021)	Efektivitas Bank Sampah Pada Tingkat Rw Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Maksimal Karena efektivitas dari Pengurangan sampah 42% sedangkan efektivitas penanganan sampah 37%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tingkat RW di Kelurahan Mamasa belum efektif.</li> </ul>
3.	(Yulia, 2020)	Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektif dikarenakan adanya hambatan internal seperti sumber daya manusia tidak memadai, masih kurangnya anggaran yang diberikan, dan sarana prasarana tidak memadai.</li> </ul>
4.	(SR & Lestari, 2021)	Efektivitas Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kota Semarang Yang Bersih (studi kasus: pengelolaan	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Jati bareng sudah efektif dikarenakan inovasi adanya pengelolaan sampah yang semakin meningkat</li> </ul>

		sampah di TPA Jatibarang)		sehingga masalah dapat diatasi.
5	(Wati et al., 2021)	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Di Indonesia	Pendekatan Kualitatif dengan study literatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah skala nasional dan daerah belum menemukan solusi yang tepat. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan 3R belum optimal.</li> </ul>
6	(Ari Fatul Husna, 2019)	Efektivitas Organisasi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Pendekatan Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah efektif. Bank Sampah merupakan mitra pemerintah Kota Malang yang mampu mengatasi masalah sampah dengan pengelolaan sampah 3R.</li> <li>• Dalam upaya mencapai tujuan tersebut bank sampah kota malang melakukan berbagai faktor agar bisa menyelesaikan tugas pengelolaan sampah masyarakat dengan menjalin</li> </ul>

				komunikasi yang baik antar pegawai.
7.	(Didik et.al.,2021)	Pengelolaan Sampah Masyarakat Melalui TPS3R Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There was an increase in public awareness to sort organic and inorganic waste so that waste processing in TPS3R Purwojati Village, Ngoro District, Mojokerto Regency is more efficient and more organized.</li> </ul>
8.	(Salsabila et al., 2021)	The Importance Of Public Participation in sustainable solid waste menagement	Qualitative approach chosen to analyze literatures and comparative analysis	The results shown that governance and participation become the main factors affected the status of MSWM as it is mentioned in most of the previous studies in the Philippines. Which is different with the previous studies in Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Apriliani & Maesaroh, 2021) dengan judul “Efektifitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah

(Sistem Laporan Sampah)” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Belum maksimal karena kurangnya sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan program Silampah mengakibatkan Kurang maksimalnya kesadaran masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mildayati et al., 2021) dengan judul “Efektivitas Bank Sampah Pada Tingkat Rw Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa” dengan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Belum Maksimal Karena efektivitas dari Pengurangan sampah 42% sedangkan efektivitas penanganan sampah 37%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tingkat RW di Kelurahan Mamasa belum efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yulia, 2020) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Belum maksimal adanya hambatan internal seperti sumber daya manusia tidak memadai, masih kurangnya anggaran yang diberikan, dan sarana prasarana tidak memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh (SR & Lestari, 2021) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kota Semarang Yang Bersih (studi kasus: pengelolaan sampah di TPA Jatibarang)” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Jati bareng sudah efektif dikarenakan inovasi adanya pengelolaan sampah yang semakin meningkat sehingga masalah dapat diatasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wati et al., 2021) dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Di Indonesia” metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan sampah skala nasional dan daerah belum menemukan solusi yang tepat. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan 3R belum optimal.

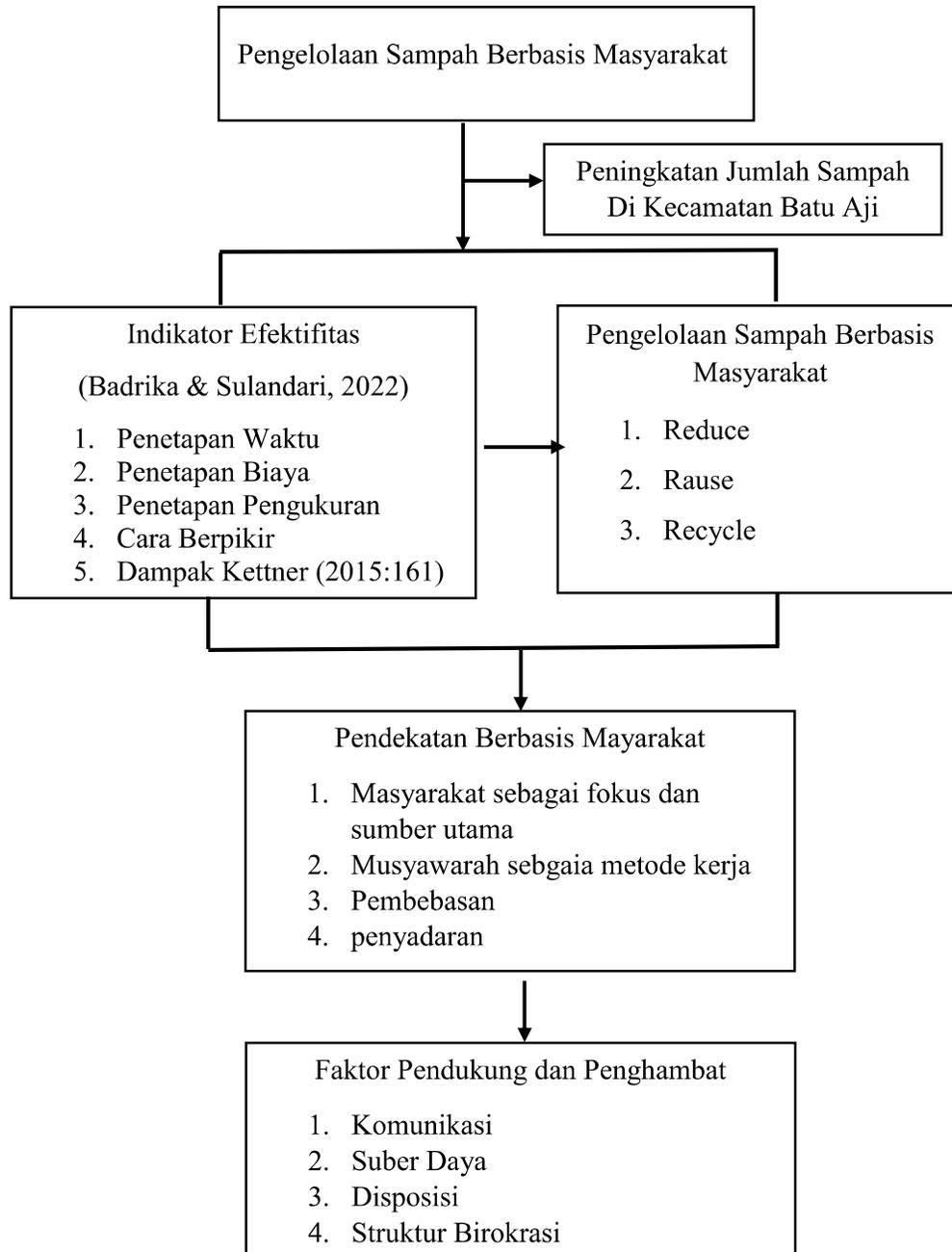
Penelitian yang dilakukan oleh (Ari Fatul Husna, 2019) dengan judul “Efektivitas Organisasi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat” metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah efektif. Bank Sampah merupakan mitra pemerintah Kota Malang yang mampu mengatasi masalah sampah dengan pengelolaan sampah 3R. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut bank sampah kota Malang melakukan berbagai faktor agar bisa menyelesaikan tugas pengelolaan sampah masyarakat dengan menjalin komunikasi yang baik antar pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh (Didik et.al., 2021). dengan judul “Pengelolaan Sampah Masyarakat Melalui TPS3R Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto” metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sehingga pengolahan sampah di TPS3R Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto lebih efisien dan tertata.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila et al., 2021) dengan judul “The Importance Of Public Participation in sustainable solid waste management”

Qualitative approach chosen to analyze literatures and comparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dan partisipasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi status MSWM (Municipal Solid Waste Management) saat ini disebutkan di sebagian besar penelitian sebelumnya di Filipina. Yang berbeda dengan penelitian sebelumnya di Indonesia.

### 2.3 Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1** Kerangka Berpikir